

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga awal tahun 2026, gambaran kerentanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh isu kemiskinan struktural dan rendahnya perlindungan bagi pekerja informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Provinsi NTT bekerja di sektor informal (64,69%).¹ Umumnya, mereka bekerja serabutan, petani, nelayan, asisten rumah tangga, tukang dan pekerja migran tanpa perlindungan jaminan sosial penuh.²

Kondisi ini menjadi kian memprihatinkan karena mayoritas dari mereka adalah warga gereja. Dalam konteks jemaat GMIT Alfa Omega Labat, sebagian besar anggota jemaat menggantungkan hidup pada pekerjaan informal seperti petani kecil, buruh harian, pekerja lepas, dan pedagang di pasar.³ Pekerjaan-pekerjaan ini menopang kehidupan keluarga, namun risiko kecelakaan kerja, sakit, serta kematian pencari nafkah, merupakan tantangan nyata yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup keluarga jemaat.

Kerentanan ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga menjadi urgensi nyata bagi gereja dalam memastikan jemaatnya memiliki ketahanan hidup yang layak. Gereja dituntut merumuskan respons iman yang bertanggung jawab terhadap realitas kehidupan. Dalam kerangka ini, diakonia dipahami sebagai perwujudan kasih Allah yang menjembatani pengakuan iman gereja dengan tindakan nyata bagi jemaat yang rentan.

¹ Data ini merupakan angka estimasi awal untuk tahun 2025 yang bersumber dari laporan BPS NTT. <https://biropbjntt.net/opini/perlindungan-semesta-bagi-pekerja-informal-ntt.html>. Diakses, 11 Februari 2026

² Lucius Widodo Luly, "Perlindungan Semesta Pekerja Informal NTT," *Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT*, April 29, 2025, <https://biropbjntt.net/opini/perlindungan-semesta-bagi-pekerja-informal-ntt.html> (diakses 11 Februari 2026).

³ Sekretariat Jemaat GMIT Alfa Omega Labat, *Data Administrasi Jemaat* (dokumen internal, Kupang, 2025).

Dalam perspektif teologis, diakonia merupakan salah satu dimensi universal dalam misi gereja yang menyatu dengan kesaksian dan persekutuan umat.⁴

Dalam tradisi bergereja, GMIT membagi diakonia ke dalam tiga bentuk yaitu diakonia karitatif, diakonia transformatif, dan diakonia reformatif. Secara konkret, *diakonia karitatif* diwujudkan dalam bentuk pemberian roti bagi yang lapar, pakaian bagi yang telanjang, tumpangan bagi tunawisma, dan lain sebagainya.⁵ *Diakonia reformatif* berorientasi pada pemberdayaan jemaat melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, yang dalam jangka panjang diarahkan untuk membangun kemandirian.⁶ Sementara itu, *diakonia transformatif* adalah pengembangan misi pembebasan yang dilakukan gereja menghadapi kenyataan sosial.⁷

Meskipun diakonia merupakan wujud nyata kepedulian gereja terhadap jemaat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam banyak kasus, gereja menghadapi keterbatasan dana, sumber daya, dan kapasitas pelayanan sehingga bantuan yang diberikan sering kali bersifat insidentil, bergantung pada situasi tertentu, dan belum sepenuhnya menjawab berbagai kebutuhan jemaat yang semakin kompleks. Realitas tersebut mengindikasikan perlunya pengembangan pendekatan pelayanan yang mampu menjangkau kebutuhan jemaat secara lebih luas dan berkesinambungan.

Pada sisi yang lain, negara telah menyediakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dilaksanakan antara lain melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial. Namun, meskipun sistem tersedia, cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal (terutama warga gereja) masih menjadi tantangan besar. Di NTT, belum semua pekerja informal terlindungi, hingga tahun 2025, tingkat kepesertaan berada pada

⁴ GMIT, *Tata Gereja Masehi Injili Di Timor 2010 (Perubahan Pertama)*, 32.

⁵ Manullang, "Konsep Misi-Diakonia Dalam Konteks Indonesia," 41.

⁶ Nulik and Koli, "Analisis Permasalahan Pelayanan Diakonia Transformatif Di Jemaat GMIT Sion Loti," 136–51.

⁷ Artanto, *Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia*, 213.

angka 45,83%.⁸ Penyelenggaraan jaminan sosial ini merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 28H ayat (3)⁹ dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.¹⁰ Oleh karena itu, rakyat dan negara harus memiliki kerja sama yang kuat untuk mengendalikan perekonomian sebagai tindakan preventif terhadap paham liberalisme dan kapitalisme yang menyerahkan dinamika ekonomi kepada mekanisme pasar.¹¹

Secara ontologis, terdapat perbedaan mendasar antara logika akumulasi kapital dengan prinsip jaminan sosial nasional; jika kapitalisme menginstitusionalisasi ketimpangan melalui kebijakan yang lebih memprioritaskan efisiensi ekonomi dibandingkan kesejahteraan sosial,¹² maka jaminan sosial diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.¹³ Hak-hak dasar itu seperti jaminan kematian, kecelakaan kerja dan masa depan pendidikan keluarga ahli waris.

Menyadari kesenjangan antara sumber daya internal gereja dan kompleksitas risiko sosial di era modern menuntut adanya inovasi dalam tata kelola pelayanan. Dalam konteks inilah, kerja sama antara gereja dan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh signifikansinya sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang dapat dipahami melalui perspektif *collaborative governance*. Melalui model tata kelola kolaboratif ini, gereja tidak lagi berjalan sendirian, melainkan membangun sinergi lintas sektor dengan negara. Keberhasilan kolaborasi ini tampak nyata ketika gereja mengambil peran aktif sebagai penanggung iuran bagi jemaatnya.

⁸ Kornelis Kaha, "Bantuan Iuran Jamsos Ketenagakerjaan NTT 2026 Menyasar 50 Ribu Pekerja."

⁹ Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

¹⁰ Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

¹¹ Cahyandari et al., "Hak Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Negara Kesejahteraan."

¹² Umbara and Firdaus, "Ketidakadilan Ekonomi Dan Alienasi Pekerja: Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis," 615–23.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Jakarta: Republik Indonesia, 2011), [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/UU_24_Tahun_2011_\(1\).pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/UU_24_Tahun_2011_(1).pdf) (diakses 2 Februari 2026).

Kerja sama antara gereja Alfa Omega Labat dengan BPJS Ketenagakerjaan terlaksana sejak tahun 2023. Gereja telah mendaftarkan 600 orang jemaat dalam program Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai bentuk diakonia transformatif.¹⁴ Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa GMT Alfa Omega Labat termasuk jemaat yang aktif serta konsisten mengimplementasikan program ini, dan beberapa kali menerima penyerahan santunan kematian.¹⁵ Meskipun BPJS Ketenagakerjaan terbukti berkontribusi pada perlindungan terhadap risiko sosial, kesehatan, dan kecelakaan kerja¹⁶ dengan iuran yang sangat murah dan terjangkau untuk masyarakat.¹⁷ Namun, mekanisme pengelolaan risiko yang digunakannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan modernitas.

Di tengah masyarakat modern, berbagai aspek kehidupan semakin dikelola melalui sistem birokrasi, administrasi, dan kalkulasi rasional. Max Weber menyebut kecenderungan ini sebagai rasionalisasi yang dapat menghasilkan efisiensi, tetapi sekaligus berpotensi menempatkan manusia dalam *“sangkar besi” (iron cage)*¹⁸ aturan dan prosedur. Fenomena tersebut juga menjadi relevan untuk membaca praktik pelayanan gereja yang semakin berinteraksi dengan sistem kelembagaan modern, termasuk dalam bidang perlindungan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas diakonia gereja yang lebih berfokus pada pelayanan karitatif, pemberdayaan jemaat, maupun respons gereja terhadap berbagai persoalan sosial. Di sisi lain, penelitian mengenai BPJS Ketenagakerjaan dikaji dari perspektif kebijakan publik. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang menghubungkan kedua bidang tersebut, khususnya yang menelaah kerja

¹⁴ Sekretariat Majelis Jemaat GMT Alfa Omega Labat, *Daftar Kolektif Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jemaat BPU* (dokumen internal, Kupang, 2025).

¹⁵ BPJS Ketenagakerjaan, "Hadirkan Perlindungan Sosial bagi Jemaat," *Tribunnews Kupang*, 16 Juli 2025, <https://kupang.tribunnews.com/bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-perlindungan-sosial-bagi-jemaat-gmit-alfa-omega> (diakses 10 Desember 2025).

¹⁶ Orias, "Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo," 21–26.

¹⁷ Firdausi and Putera, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Di BPJS Ketenagakerjaan Padang."

¹⁸ Tondok et al., "Kritik Terhadap Rasionalitas: Integrasi Psikologis, Filosofis, Dan Sosial-Kultural," 33–39.

sama antar gereja dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai praksis diakonia dalam konteks perlindungan sosial.

Akibatnya, dimensi teologis dari keterlibatan gereja dalam penyediaan perlindungan sosial melalui mekanisme kelembagaan modern juga belum banyak mendapat perhatian. Kekosongan kajian inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik kerja sama antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk diakonia yang berupaya memperkuat ketahanan sosial jemaat, serta merefleksikan praktik tersebut dalam terang doktrin providensia Allah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola sinergi antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan dalam praksis pelayanan diakonia, serta apa saja hambatan dan peluang yang muncul dalam implementasinya?
2. Apa signifikansi kerja sama tersebut sebagai wujud diakonia dalam memitigasi kerentanan jemaat secara berkelanjutan, dalam dinamika rasionalitas sistem jaminan sosial negara?
3. Sejauh mana kerja sama antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami dalam terang Providensia Allah dalam memelihara kehidupan jemaat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pola sinergi antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan dalam praksis pelayanan diakonia, termasuk hambatan dan peluang dalam implementasinya.
2. Menganalisis signifikansi kerja sama tersebut sebagai model diakonia dalam memitigasi kerentanan jemaat secara berkelanjutan di tengah rasionalitas sistem jaminan sosial negara.
3. Mengkaji sejauh mana kerja sama antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan dipahami dalam terang Providensia Allah dalam memelihara kehidupan jemaat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus landasan teologis diakonia di tengah arus globalisasi. Sekaligus, memperkaya relasi gereja dan negara, melalui *collaborative governance* sebagai kerangka praksis iman yang kontekstual dalam merespons kerentanan sosial-ekonomi jemaat.

2. Manfaat Praktis

Bagi GMIT Alfa Omega Labat, penelitian ini menjadi bahan refleksi bagi gereja dalam mengevaluasi kebijakan jaminan sosial agar tetap berpihak pada kesejahteraan jemaat, tanpa kehilangan identitas teologisnya.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi fokus analisis pada pola kerja sama antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS Ketenagakerjaan dalam kerangka *collaborative governance*, dengan penekanan khusus pada mekanisme pembiayaan iuran jaminan sosial yang ditanggung oleh institusi gereja bagi jemaat. Batasan penelitian secara eksklusif diarahkan pada peran gereja dalam memastikan akses perlindungan kerja sebagai hak dasar jemaat, bukan sebagai komoditas komersial. Sehingga, penelitian ini tidak mengeksplorasi seluruh program jaminan sosial pemerintah atau praktik asuransi swasta yang berorientasi pada profit.

Secara teologis, analisis juga dibatasi pada diskursus diakonia transformatif yang berdialog dengan kritik terhadap kapitalisme global dalam sistem jaminan sosial. Subjek penelitian dipusatkan pada aktor kunci di lingkup kebijakan gereja yang terlibat langsung dalam kolaborasi: Klasis, Jemaat, pengurus diakonat, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta jemaat yang berdampak langsung oleh program tersebut.

1.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat posisi teoretis dan memastikan orisinalitas dalam pengkajian fenomena kerja sama antara GMIT Alfa Omega Labat dan BPJS

Ketenagakerjaan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, penelitian oleh **Nimrot Doke Para et al.** di jemaat GMT Ora Et Labora Oesapa, yang berjudul "*Peran Gereja dalam Transformasi Pelayanan Diakonia*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan diakonia yang bersifat konsumtif belum mampu mendorong pemberdayaan jemaat dan perubahan hidup secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya transformasi pelayanan diakonia menuju pola reformatif dan transformatif.¹⁹

Penelitian tersebut belum mengkaji keterlibatan Gereja dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai bagian dari strategi diakonia transformatif. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan diskursus tersebut dengan memfokuskan perhatian pada peran gereja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pelayanan diakonia.

Kedua, studi yang dilakukan oleh **Risno Djabu et al.** mengenai "*Kemitraan Gereja dan Pemerintah dalam Menangani Kaum Lemah Di Indonesia: Tinjauan Biblikal atas Keluaran 22:21-27*". Fokus utama Risno Djabu et al. adalah menganalisis kemitraan Gereja di Indonesia dan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan.²⁰ Penelitian Djabu et al. menunjukkan bahwa perhatian terhadap kaum miskin merupakan mandat penting dalam iman Kristen. Dan karena itu, gereja dan pemerintah dapat menjalin kemitraan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Hanya saja, penelitian tersebut tidak menggali tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam implementasi kemitraan ini.

Dengan demikian, penelitian ini akan menempatkan kerja sama gereja dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai praksis teologis diakonia transformatif dalam menjawab isu kerentanan hidup jemaat sekaligus membahas

¹⁹ Para, Tari, and Ruku, "Peran Gereja Dalam Transformasi Pelayanan Diakonia," *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 81–93.

²⁰ Djabu and Angelina, "Kemitraan Gereja Dan Pemerintah Dalam Menangani Kaum Lemah Di Indonesia : Tinjauan Biblikal Atas Keluaran 22 : 21-27," 181–98.

tantangan, peluang serta perubahan yang dicapai dalam implementasi kemitraan ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh **Fifin Indrawati dan Mohammad Natsir** mengkaji penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance*. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja rentan dalam meningkatkan kepesertaan dan efektivitas program jaminan sosial.²¹

Hasil penelitian memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan sebagai hasil kolaborasi beragam pemangku kepentingan. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan peran Lembaga keagamaan, khususnya gereja, sebagai aktor potensial dalam kerangka *collaborative governance*. Penelitian ini melengkapi studi tersebut dengan mengkaji keterlibatan gereja sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam kerangka diakonia transformatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh **Yohanes Hasiholan Tampubolon** mengenai “*Misi Gereja Di Era Kapitalisme Global: Eksplorasi Pelayanan Misi Yesus*” menemukan bahwa tantangan di era kapitalisme global saat ini, memaksa gereja untuk melakukan misi dengan cara baru. Pelayanan Yesus dapat menjadi teladan untuk menghadapinya. Gereja dapat melakukan upaya-upaya perubahan yang bersifat transformatif yang berwujud spiritual, ideologis, hingga struktural dan sistemik.²²

Penelitian oleh Tampubolon, telah memberikan fondasi kritis mengenai transformasi sistemik, tetapi ia tidak membahas instrument teknis seperti jaminan sosial negara. Penelitian ini akan menguji arah misi transformatif tersebut dalam praktik kerja sama Gereja dan BPJS Ketenagakerjaan. Kerangka ‘Misi Yesus’ digunakan sebagai tolok ukur

²¹ Indrawati and Natsir, “Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Probolinggo,” 439–51.

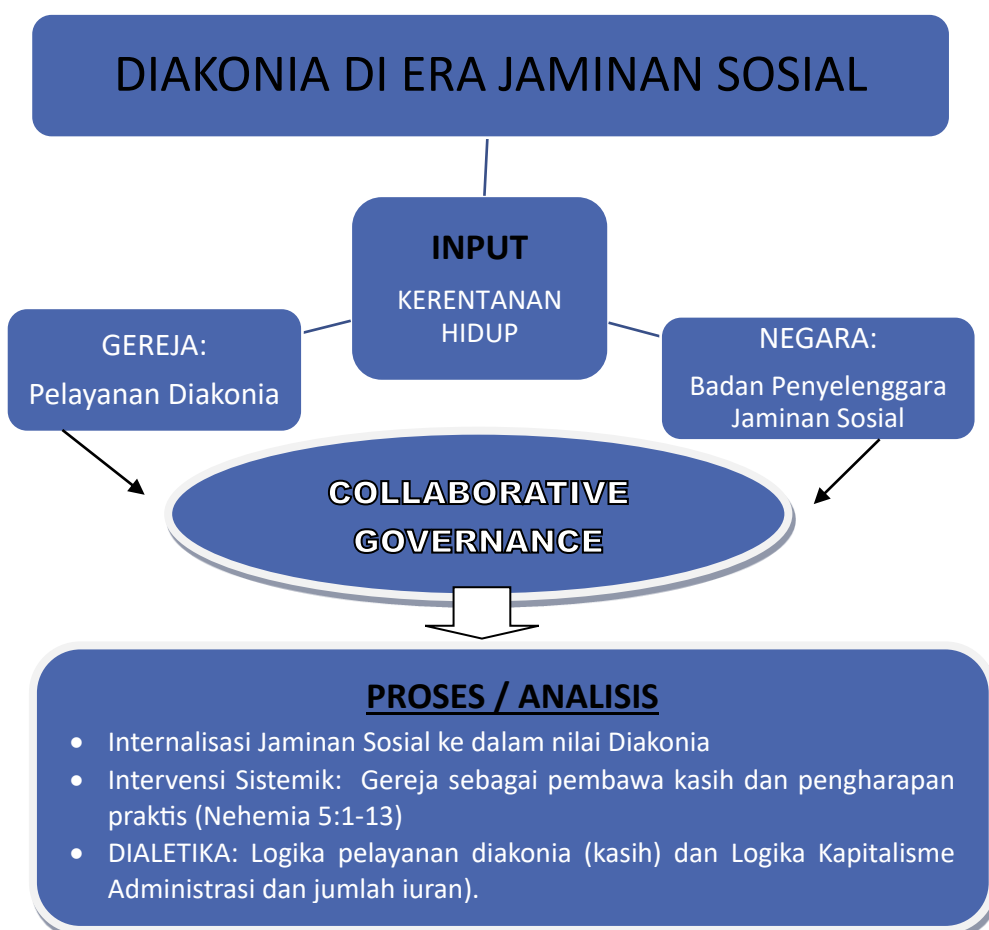
²² Tampubolon, “Misi Gereja Di Era Kapitalisme Global: Eksplorasi Pelayanan Misi Yesus,” 197–217.

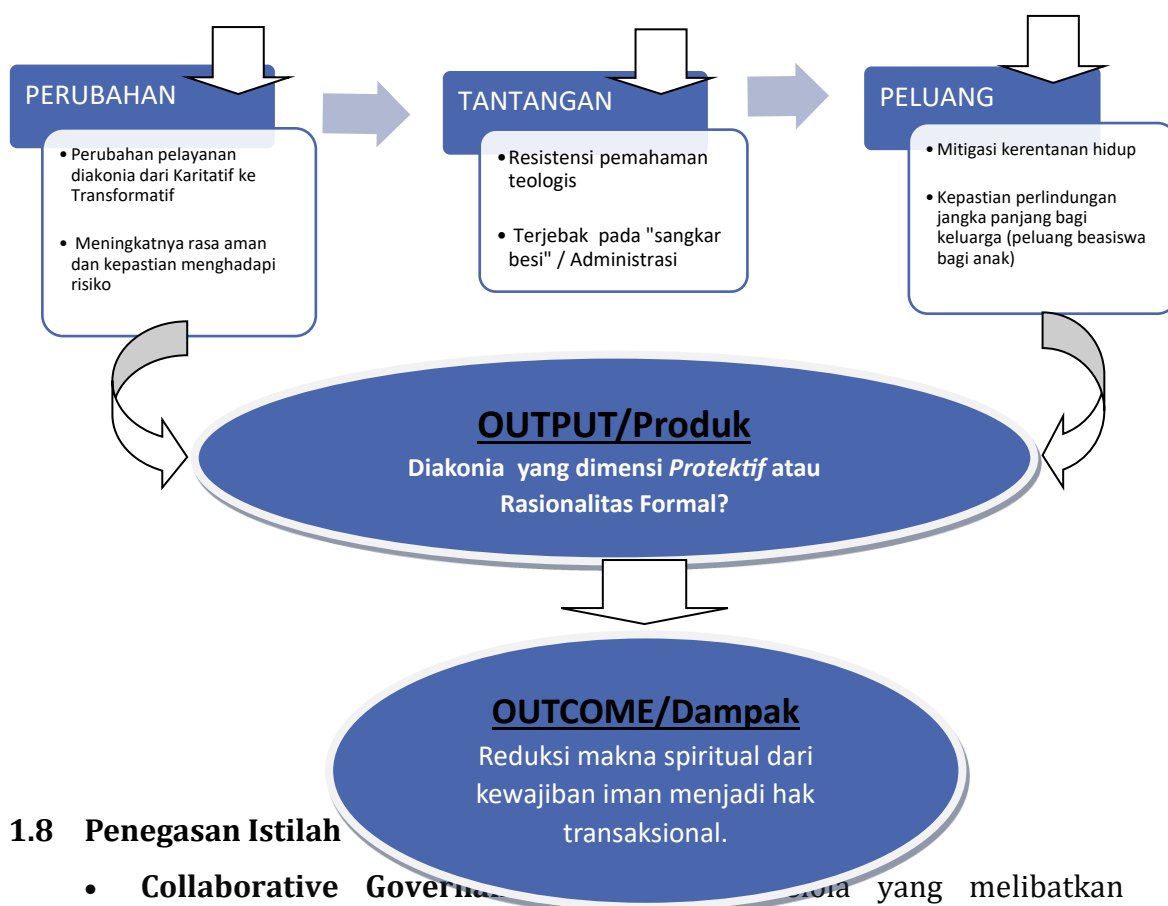
untuk menguji apakah kerja sama tersebut merupakan Tindakan profetik yang membebaskan, ataukah sekadar kepatuhan administratif pada sistem negara.

Kelima, penelitian oleh **Mustafiril Ismail et. al**, mengenai *“Sosiologi Agama dari Sudut Pandang Max Weber: Rasionalisasi, Etika dan Solidaritas Sosial dalam Kehidupan Keagamaan Modern”* menemukan bahwa proses rasionalisasi diposisikan sebagai karakter utama masyarakat modern yang secara signifikan memengaruhi kehidupan keagamaan. Agama tidak secara langsung mengalami kehilangan peran dan makna akibat rasionalisasi.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Max Weber dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami keberlangsungan serta transformasi agama di tengah modernitas. Dengan demikian penelitian ini, akan mengkaji lebih jauh dengan menguji konsekuensi teologis dari rasionalisasi tersebut dalam kerja sama gereja dan BPJS Ketenagakerjaan.

1.7 Kerangka Berpikir





1.8 Penegasan Istilah

- **Collaborative Governance:** Model tata lola yang melibatkan kemitraan strategis antara sektor publik (BPJS Ketenagakerjaan) dan aktor non negara (GMIT Alfa Omega Labat) untuk mencapai tujuan perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang tidak dapat dicapai secara optimal oleh satu pihak saja.
- **Rasionalitas Instrumental:** Cara berpikir yang menekankan efisiensi, perhitungan, prosedur, dan penggunaan sarana yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan.
- **Sangkar Besi (*The Iron Cage*):** Lensa analisis untuk mengidentifikasi potensi keterjebakan pelayanan diakonia gereja dalam aturan birokrasi yang kaku dan impersonal.
- **Komodifikasi Hidup:** Kecenderungan yang mungkin muncul dalam logika perlindungan berbasis iuran dan manfaat.

- **Diakonia Transformatif:** Pelayanan gereja yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendorong perubahan kehidupan jemaat secara berkelanjutan melalui kerja sama, pemberdayaan, dan keterlibatan dalam sistem sosial.

1.9 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai arah penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, termasuk review hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini, penegasan istilah dan juga kerangka berpikir serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN LANDASAN TEOLOGIS

Bagian ini menyajikan kajian teori dan landasan teologis yang mendukung analisis penelitian. Landasan Teori memuat penjelasan teori-teori utama dan konsep variabel yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan prosedur dan teknis pelaksanaan penelitian di lapangan. Di dalamnya mencakup lokasi serta populasi dan sampel yang dipilih, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data hingga mendapatkan kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai kerja sama GMT Alfa Omega Labat dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan diakonia gereja, serta analisis makna teologis diakonia dalam

praktik tersebut. Analisis ini berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan fokus pada signifikansi kerja sama gereja dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk diakonia transformatif. Pendekatan collaborative governance digunakan untuk melihat relevansi kerja sama tersebut dalam konteks diakonia bagi jemaat yang rentan, sekaligus dikritisi dengan menggunakan teori Weber tentang rasionalitas.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini berisi ringkasan temuan, implikasi teologis, rekomendasi ilmiah-pastoral bagi penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN